

BAB VI

KESIMPULAN

Menurut Stuart Gerry Brown bahwa yang dimaksud kelompok penekan adalah setiap kelompok atau organisasi yang bertujuan, melalui persuasi dan propaganda atau lainnya, untuk mempengaruhi dan membentuk kebijakan pemerintah. Cara yang digunakan oleh LSM GMBI dalam proses melakukan rencana strategis menghadapi kasus penggusuran pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi tahun 2013 dengan melakukan musyawarah tanpa membawa kasus ke jalur hukum dan tidak dengan tindakan kekerasan, LSM GMBI secara terbuka memberikan surat kepada Kementerian (BUMN) Badan Usaha Milik Negara, dan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait untuk melindungi dan mengamankan dari oknum-oknum yang ingin melakukan upaya penertiban sepihak, baik itu dari masyarakat umum, kecamatan, dan kelurahan. Sehingga pedagang kaki lima tidak digusur secara paksa, tetapi diberikan ruang diskusi untuk bermediasi agar diberikan tempat pengganti yang layak untuk berjualan sehingga tidak kehilangan mata pencaharian sehari-hari. Dengan adanya LSM GMBI sebagai pihak ketiga yang netral dan terlibat hanya sebagai advokator dan mediator yang terus mendampingi selama konflik berlangsung, harapan LSM GMBI seharusnya pihak pemerintah daerah harus mulai dapat menyadari. Pertama: bahwa apabila pedagang kaki lima dihilangkan, berarti pemerintah sudah mematikan sumber nafkah rakyatnya sendiri. Kedua: penggusuran pedagang kaki lima hendaknya tidak semena-mena. Pedagang kaki lima harus diberitahu jauh hari sebelumnya, bahwa mereka akan dipindahkan, digusur atau ditertibkan. Ketiga: pemerintah

harus adil dan tegas kepada para pedagang. Umumnya pedagang kaki lima tidak mau berubah dengan alasan telah memberikan berbagai jaminan yang juga telah dicabut oleh pemerintah. Sejak awal, ketika PKL masih sedikit, pemerintah harus tegas menerapkan peraturan yang membatasi jumlah PKL. Keempat: Pedagang kaki lima pun harus disiplin dan memperhatikan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan dengan baik. Kadangkala pedagang kaki lima memang susah diatur. Mereka seandainya sendiri tidak memikirkan orang lain. Seharusnya mereka sadar, jika mereka disiplin dan menjaga kebersihan, pemerintah juga tidak akan sembarangan melakukan pengusuran. Agar proses implementasi kebijakan menjadi lebih jelas dan adil, tujuan resolusi konflik dalam penelitian ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang pro implementasi dan pihak yang anti implementasi. Ketika semua harus dikendalikan oleh kebutuhan dasar identitas semua pihak. Menanggapi atas fakta empiris yang terjadi di masyarakat mengenai LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang selama ini sebagian kalangan masyarakat menilai sebagai LSM baru yang arogan dan tidak peduli dengan aksi sosial. Pasalnya, persoalan tersebut disebabkan banyaknya pemberitaan yang menyimpang tentang LSM GMBI yang seolah-olah merupakan ormas yang brutal. Tujuan utama khusus LSM GMBI adalah membantu pemerintah melaksanakan dan meningkatkan pembangunan khususnya bagi masyarakat Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya berdasarkan tanggung jawab sosial bersama dalam suasana kekeluargaan, kehandalan, Amaliah dan Istiqomah.